

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar, Yesmil, et. al, 2009, *Sistem Peradilan Pidana : Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Arief Nawawi, Barda, 2007, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi, 2010, *Mafia Hukum : Menguak Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang, Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jaya Putra Serikat, Nyoman, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- M. Ramli, Ahmad, 2006, *Cyber Law dan HAKI, Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- New Merah Putih, 2009, *Undang-Undang ITE, (Informasi dan Transaksi Elektronik)*, New Merah Putih, Yogyakarta.
- Raharjo, Agus, 2002, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunarso, Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus Prita Mulyasari*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Salman, Otje, dkk, 2008, *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Tim Ganeca Sains Bandung, 2007, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Penabur Ilmu, Bandung.

Waskito, A.A., 2010, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, PT. Wahyu Media, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Laksbang Meditama, Yogyakarta

## **B. Peraturan dan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Trafficking Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

### **C. Website**

Esther Dyson, *A Magna Carta for the Knowledge Age*, <http://www.pff.org/>, diakses tanggal 15 Desember 2014.

Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, op.cit.* hlm. 133-134, <http://staff.ui.ac.id/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2015.

<http://www.law.northwestern.edu/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2014.